

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2017 – 2022**



**KECAMATAN SAWAN
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Renstra (Rencana Strategis) dapat diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi kewajiban sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sawan

Renstra Pemerintah Kecamatan Sawan 2017-2022 disusun dalam rangka sebagai acuan pengambilan keputusan untuk memilih berbagai kemungkinan sumberdaya yang ada dan harus dialokasikan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun kedepan arah dan kebijakan organisasi secara garis besar telah terprogram secara sistematis

Disadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini kiranya masih banyak kekurangan, oleh karena itu pihak yang terkait diharapkan masukannya demi sempurnanya penyusunan dimaksud. Akhirnya dengan selesainya Renstra ini semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sangsit, 4 Januari 2021

Camat Sawan,



I Gusti Putu Mastika, SSTP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800327 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN SAWAN	7
2.1 Tugas dan Pokok Fungsi Kecamatan Sawan	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sawan	18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	19
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	21
2.5 Tantangan dan Peluang Kecamatan Sawan	22
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sawan	24
3.2 Telahaan Visi dan Misi Daerah	28
3.3 Telahaan Renstra Kementrian Dalam Negeri	29

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Sawan	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Analisis SWOT	44
5.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII PENUTUP	56

Lampiran Renstra (Rencana Strategis) 2017 – 2022 Kecamatan Sawan Kabupaten
Buleleng Tahun 2017 - 2022

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2017 - 2022**



**KECAMATAN SAWAN
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Renstra (Rencana Strategis) dapat diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi kewajiban sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sawan

Renstra Pemerintah Kecamatan Sawan 2017-2022 disusun dalam rangka sebagai acuan pengambilan keputusan untuk memilih berbagai kemungkinan sumberdaya yang ada dan harus dialokasikan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun kedepan arah dan kebijakan organisasi secara garis besar telah terprogram secara sistematis

Disadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini kiranya masih banyak kekurangan, oleh karena itu pihak yang terkait diharapkan masukannya demi sempurnanya penyusunan dimaksud. Akhirnya dengan selesainya Renstra ini semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sangsit, 4 Januari 2021

Camat Sawan,



I Gusti Putu Mastika, SSTP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800327 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN SAWAN	7
2.1 Tugas dan Pokok Fungsi Kecamatan Sawan	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sawan	18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	19
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	21
2.5 Tantangan dan Peluang Kecamatan Sawan	22
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sawan	24
3.2 Telaahan Visi dan Misi Daerah	28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	29

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Sawan	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Analisis SWOT	44
5.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII PENUTUP	56

Lampiran Renstra (Rencana Strategis) 2017 – 2022 Kecamatan Sawan Kabupaten
Buleleng Tahun 2017 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.

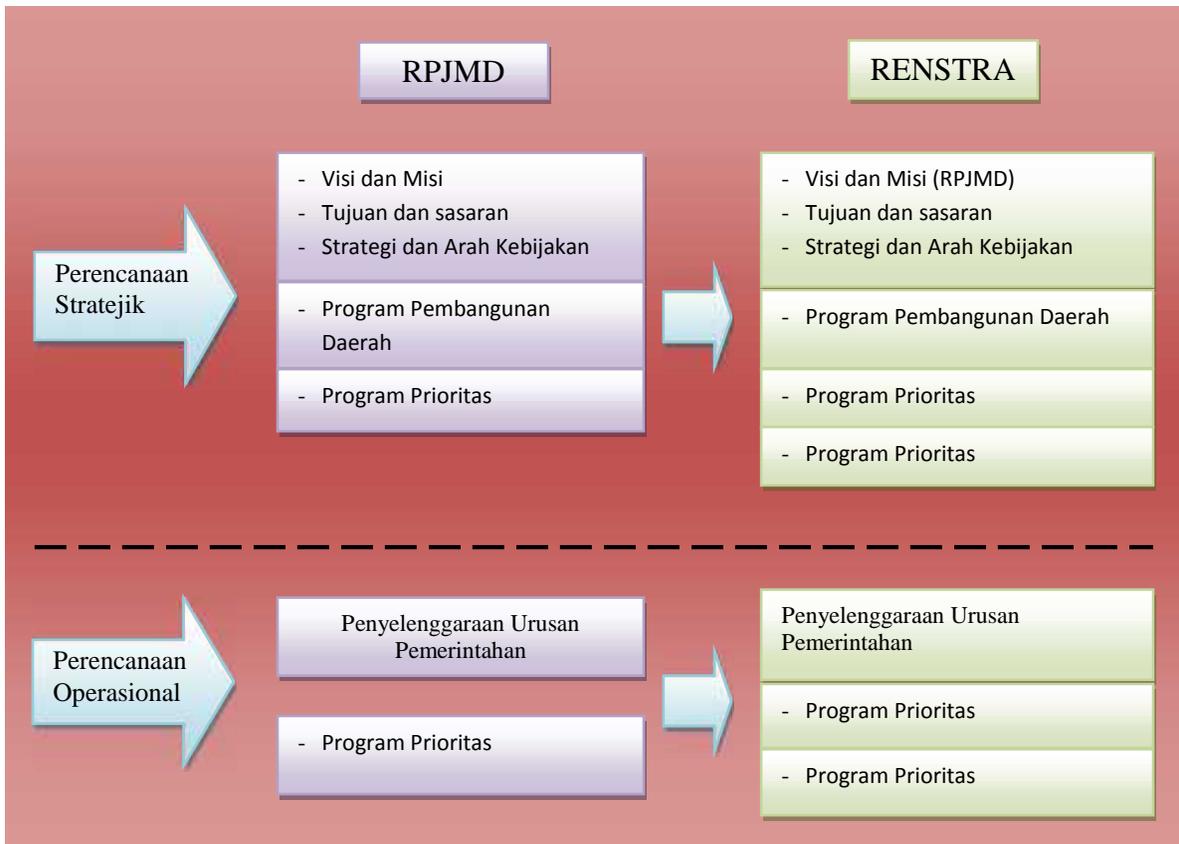
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Kelompok Kerja Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Sawan selaku kepala OPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappedalitbang Kabupaten Buleleng.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menjabarkan visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Tupoksi Pemerintah Kecamatan Sawan dan Pelimpahan tugas yang diberikan Bupati kepada Camat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 adalah :

- 1) Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kecamatan Sawan , sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
- 2) Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Pemerintah Kecamatan Sawan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng,

sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sawan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Kedudukan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Sawan proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Sawan bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kecamatan Sawan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sawan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Sawan disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Gambaran Pelayanan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, mengacu pada tugas dan fungsi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan strategi dan agenda prioritas, serta arah kebijakan dan indikator-indikator sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah

ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SAWAN

VII Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ---(IKU adalah indikator sasaran dan IKK: dengan target target pertahun, basicnya dari bab II)----

BAB PENUTUP

VIII

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PEMERINTAH KECAMATAN SAWAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

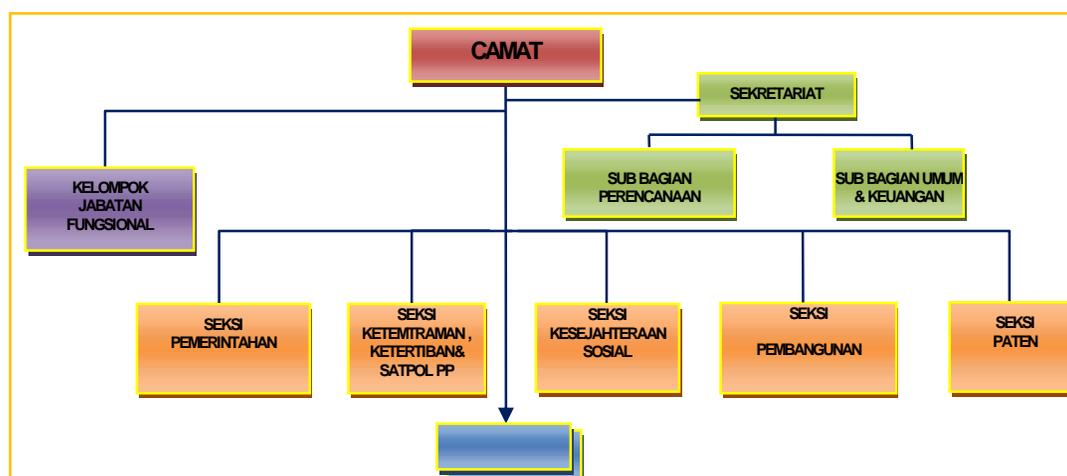
2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sawan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak melaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadikan kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. CAMAT :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Merumuskan dan mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- e) Merumuskan dan mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f) Merumuskan dan merumuskan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h) Merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan social budaya;
- j) Merumuskan dan mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k) Merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan desa;
- l) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadilan, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksana pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;

- p) Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRAO, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan survey Keputusan Masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan;
- q) Merumuskan penyusunan Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- s) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kecamatan ;
- t) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kinerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- u) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) SEKRETARIAT.

- a) menyusun rencana kegiatan sekretariat, berdasarkan data program kecamatan dan ketentuan perundang-undangam yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e) Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan kecamatan;

- h) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- j) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan;
- k) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l) memfsilitasi dan melaksanakan mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m)memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n) mwmfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- i) melaksanakan dan menyusun Standar laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberrikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyerurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan ;
- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, penyusunan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB) dan system Pengawasan dilingkungan Kecamatan;
- k) menerima, menyimpamn mengeluarkan dan membuat laoran pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;

- l) menyiapkan bahan, penyusunan serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta pembendaharaan;
- m) melaksanakan pengurusan administrasi keuangan meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), dan Surat Perintah Pembayaran(SPM);
- n) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- o) melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

3) SEKSI PEMERINTAHAN

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa

- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

4) SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai Tugas;

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
- e) Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
- f) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
- g) Melaksanakan pendataan swdaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

5) SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan ;
- d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e) Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- f) Melaksanakan penertiban/pegawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;

- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan
- 6) SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
 - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d) Melaksanakan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - e) Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
 - f) Melaksanakan Pelayanan Adimistrasi Terpadu Kecamatan;
 - g) Melaksanakan koordinasi pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d) Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - e) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
 - f) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;
 - g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

RINCIAN SEBAGIAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

I. PERIJINAN

1. Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
2. Penerbitan Tnda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai ijin usaha,

II NON PERIJINAN

A. Koordinasi

1. koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
2. Koordinasi penagihan piutang Rumas Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban pembayaran;
3. Koordinasi penyelenggaraan penilaian kota Sehat Adipura;
4. Koordinasi Lomba Kebersihan dan pertamanan antar kelurahan dan antar camat se-kabupaten Buleleng;
5. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
6. Koordinasi pendataan objek pajak dan penyampaian SPPT;
7. Koordinasi Pemantauan Kemiskinan;
8. Koordinasi Pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

B. Pembinaan

1. Pembinaan Pengelola Bank sampah di Kabupaten Buleleng;
2. Pembinaan Pengelola air bersih pedesaan

C. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap sempadan/ruang sumber daya air dan jaringan asset-aset irigasi
2. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

D. Fasilitasi

1. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
2. Fasilitas pemungutan Bea Perolehan Atas tanah dan Bangunan;
3. fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

E. Penetapan

1. Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa/perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau berhalangan selama 14(empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;

2. Perismian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya;
3. Cuti Perbekel/pejabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai Perbekel;

F. Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastic di Kabupaten Buleleng;
 2. Evakuasi Rencana Peraturan Desa Tentang APBdesa;
 3. Melakukan verifikasi APBDes dan Perubahan APBdesa.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan.
- Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sebanyak 55 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Sawan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	ESELONERING	L	P	JUMLAH
	Eselon II.a	-	-	-
	Eselon II.b	1	-	1
	Eselon II.c	4	-	4
	Eselon II.d	8	-	8
	Eselon III.a	2	4	6
	Eselon III.b	-	1	1
	Eselon III.c	1	1	2
	Eselon III.d	4	-	4
	Eselon IV.a	-	1	1
	Eselon IV.b	1	-	1

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	- Orang
2	SLTP	2 Orang
3	SLTA	9 Orang
4	DIII/DIV	- Orang
5	SI	16 Orang
6	S2	1 Orang
	JUMLAH TOTAL	28 Orang

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sebanyak 28 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 orang (1,57%) memiliki pendidikan S1 sebanyak 16 orang (52,57%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 9 orang (40,28%), dan yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (3,28%).

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai *dalam lampiran*.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2019 menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%Desa yang memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikais baik	60%	65%	80%	88%	100%	88%	100%	90%
		%RAPBDesa, APBDesa, Laporan Semesteran dan LPPD Desa yg disusun dan disampaikan tepat waktu	70%	70%	85%	70%	100%	80%	100%	90%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%Usulan Pembangunan Desa yg diakomodir dalam Berita Acara Musrenbang desa dan Kecamatan	73%	81%	75%	77%	80%	78%	80%	80%
		Jumlah (Rp.) Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa	110 miliar	105 miliar	115 miliar	115 miliar	120miliar	114 miliar	130miliar	125 miliar
		Jumlah Desa Berprestasi	12 desa	11 desa	14 desa	12 desa	14 desa	12 desa	14 desa	13 desa
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Jumlah Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Linmas Desa yang aktif	255 orang	255 orang	315 orang	315 orang	375 orang	367 orang	425 orang	400 orang
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	5 lembaga	7 lembaga	5 lembaga	7 lembaga	7 lembaga
		Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang berprestasi	2 lembaga	2 lembaga						

		Frekuensi Pelaksanaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	% Responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan	70%	72%	85%	85%	100%	91%	100%	95%
		Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri	5 desa	5 desa	11 desa	9 desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa
		Jumlah desa yang telah mengelola aset desa dengan baik	4 desa	4 desa	12 desa	6 desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sumberdaya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

Uraian	Anggaran
Belanja	
- Belanja Tidak Langsung	2.200.000.000,00
- Belanja Langsung	1.194.424.336,00
Jumlah BTL dan BL	3.394.424.336,00

Realisasi keuangan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2020 untuk belanja sebesar Rp. **3.394.424.336,00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (65%) dan belanja langsung sebesar Rp. 1.194.424.336,00 (35%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2016-2020 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	4.449.754.620	4.366.204.016	98,12%
2	2017	4.583.855.500	4.561.681.305	98,90%
3	2018	4.984.926.500	4.900.760.515	98,31%
4	2019	5.080.451.000	4.997.259.047	98,36%
5	2020	3.394.424.336	3.075.863.244	90,61%
Total Anggaran Tahun 2016 - 2020		22.493.411.956	21.901.768.127	97,37%

Realisasi keuangan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng selama periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk belanja sebesar Rp. **22.493.411.956** yang terdiri dari belanja tidak langsung, dan terealisasi sebesar Rp. **21.901.768.127** (97,37%) .

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN SAWAN

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Sawan adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
 - b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
 - c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
 - d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.
 - e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.
2. Internal Organisasi / Unit Kerja :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
3. Perwilayahan :
 - a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
 - b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.
 - c. Kurang tertatanya sarana pemukiman

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sawa yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sawan dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan berikut:

1. Belum adanya penentuan standar pelayanan public tingkat kecamatan, sehingga nilai IKM masih diperoleh melalui survey sederhana yang tentu keakuratannya masih perlu dievaluasi kembali.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sawan tahun 2016 sebesar 70,45% (B)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sawan dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan, sebagai berikut:

1. Desa yang telah melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan sebesar 88 %
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar belum bisa diukur dengan pasti
3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 40 %
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial
5. Belum teradministrasinya dengan baik swadaya murni murni masyarakat
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

10. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap pengadaan Barang/jasa maupun pengelolaan barang milik daerah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sawan , sebagai berikut

1. Kurangnya SDM dan alat kerja Kecamatan;
 2. Kurang optimalnya informasi/data yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan
 3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantukelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3. Rendahnya kapasitas dan peran Pihak swasta/akademisi dalam pembangunan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2017-2022, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumberdaya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sawan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan

anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Daerah

Visi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, INTEGRITAS, LESTARI, DAN ETIKA YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

Mandiri mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Integritas mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

Lestari mengandung makna : Kemampuan daerah dalam Melaksanakan kelestarian serta kebersihan daerah.

Etika mengandung makna : nilai tentang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.

Belandaskan *Tri Hita Karana* mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Misi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pada Produk Unggulan Daerah ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas ;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan ;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik ;
6. Mewujudkan Pembnagunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Terwujudnya visi dan misi tersebut menjadi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Sawan bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sawan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 yaitu Menetapkan Kebijakannasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis daerah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Buleleng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buleleng no 77 Tahun 2017 tentang struktur, tugas,

dan fungsi Kecamatan, serta pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
 - Pencemaran lingkungan
 - Bencana Banjir dan Tanah Longsor
 - Penimbunan sampah
 - Penyediaan RTH
2. Isu Infrastruktur
 - Buruknya drainage lingkungan
 - Kualitas jalan
3. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
4. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin dan PMKS

4.		<p>2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p>3. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
----	--	---

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Buleleng adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, untuk itu tujuan yang ingin dicapai di Kecamatan Sawan adalah “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sawan**

Sasaran dari tujuan Kecamatan sawan adalah :

- 1).IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sawan, dengan indikator kinerja adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sawan
- 2).Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sawan, dengan indikator kinerja adalah prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Sawa ndengan katagori baik ;
- 3).Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawan, dengan indicator kinerja adalah :
 - A .Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan sawan
 - b. Prosentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Sasaran Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 4.1

MISI DAN TUJUAN

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sawan	IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sawan
	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sawan
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawan

Tabel 4.2

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Indikator Kinerja
1. IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sawan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sawan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Sawan dengan kategori baik
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sawan)

	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti
	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada periode Tahun 2017-2022, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 4.3
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sawan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sawan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan sawan	85% (Baik)	86% (Baik)	88% (Baik)	91% (Sangat Baik)	93% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan sawan	Persentase Pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan katagori baik	80%	87%	90%	93%	97%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sawan	75%	77%	80%	83%	87%	90%
			Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	77%	80%	83%	87%	90%

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Bupati/Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / *tools* pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Sawan dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format *Microsoft Excel* meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi (pembagi)
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. Perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi ($= \sum$ tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (\sum Seluruh bidang)
11. Prosentase perbandingan \sum nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

NO	SEKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Nilai Pembagi	Target Tahun N	Satuan	Capaian Tahun N	Capaian Kegiatan	Kinerja Seksi	
									10 = 9/5	11 = Σ tiap seksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8	10 = 9/5	11 = Σ tiap seksi
1	Pelayanan Administrasi Terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sawan	Jumlah perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	3		dokumen /ijin				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada bank sampah/pengelola sampah sejenis yang dibina	3		kali				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan obyek pendapatan daerah	3		kali				
2	Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan katagori baik	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada kepala desa/perbekel	5		kali				
			Jumlah Peraturan Desa yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen /Perdes				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan terkait Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	5		kali				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	5		kali				

			Jumlah pelaksanaan pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	5		kali				
3	Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sawan	Jumlah pembinaan terkait indikator evaluasi perkembangan desa	5		kali				
			Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan	5		%				
			Jumlah profil aktual kecamatan	5		Dokumen profil				
			Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	5		kali				
			Jumlah RKP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen RKP				
4	Linmas Kamtib dan SatPolPP	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan bulanan pelanggaran Perda di kecamatan yang ditindaklanjuti	3		dokumen /laporan				
			Jumlah pembinaan kepada linmas/hansip desa	3		kali				

			Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Ketentraman , Ketertiban Wilayah dan penanggulangan Bencana	3		kali				
5	Sosial dan Budaya	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Jumlah pementasan budaya	5		kali				
			Jumlah pembinaan dan lomba pelestarian adat dan budaya	5		kali				
			Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	5		kali				
			Jumlah pembinaan terkait pemberdayaan kesehatan masyarakat	5		kali				
			Jumlah pembinaan pelayanan terkait PMKS	5		kali				

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 2017-2022 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

5.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/ *Strenght* (S)

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Sawan secara kuantitas cukup memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati Buleleng kepada Camat .
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

b. Kelemahan/*Weakness* (W)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity* (O)

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sawan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sawan
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawan
4. Kecamatan Sawan sebagai daerah pariwisata baru di Bali Utara memiliki potensi yang banyak untuk dikembangkan. Tahun 2018 10 (sepuluh) dari 14 (Empat belas) desa yang ada ditetapkan sebagai desa wisata.

b. Ancaman/ *Treaths* (T)

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.
3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya
4. Secara eksternal Kecamatan Sawan lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sawan.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sawan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
<u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u>	<u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur Kecamatan sawan secara kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. 3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; 2. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan sawan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sawan. 3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawan 4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa 5. Kecamatan Sawan sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kabupaten Buleleng terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik ditingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.

1	2
<u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u>	<u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan 3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya 4. Secara eksternal Kecamatan sawan lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sawan . 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sawan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

5.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu lima

tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan
- d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan

2.Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.
- b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM
- c. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

3.Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4.Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. (Orpad)

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 4.7

Program dan Kegiatan Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

No	Program	Kegiatan	Seksi/Bagian
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Pelayanan Administrasi Terpadu
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembinaan Tugas- tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	Pemerintahan
3	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Lomba Desa Terpadu Pelaksanaan Musayawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Pembangunan

4	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Desa	Linmas Kamtib dan SatpolPP
		Pembinaan Linmas Hansip Desa/ Kelurahan	
		Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	
5	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Sosial dan Budaya
		Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	
6	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris Kecamatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan Perundang undangan	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar /Dalam	
7	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebeleur	
		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /oprasional	
		Penyelenggaraan Hari-hari Nasional	
8	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	
9	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Pemerintah Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dalam periode 2017-2022, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.8

**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Pemanfaatan system Informasi Teknologi	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Menciptakan profesionalisme aparat birokrat di Kecamatan	Meningkatnya Peran kecamatan dan kelurahan
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
4. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menciptakan Pemerintahan yang bebas dari KKN	Meningkatnya pemerintahan yang bebas dari KKN
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Menciptakan Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2018-2022, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Buleleng menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sawan pada periode 2017-2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil rewiu renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Sawan periode tahun 2017– 2022 sebagaimana tabel berikut :

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sawan sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka rencana strategis Kecamatan Sawan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Visi Kecamatan Sawan sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Sawan.

Rencana strategis Kecamatan Sawan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan sawan sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sawan.

Renstra SKPD Kantor Camat Sawan, Kabupaten Buleleng
Periode Pelaksanaan : 2017 s.d 2022

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten Buleleng yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2017)		Target Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun ke									
							Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		2 kegiatan	2 kegiatan	51.750.000,00	2 kegiatan	74.775.000,00	2 kegiatan	70.200.000,00	2 kegiatan	77.220.000,00	2 kegiatan	84.942.000,00	2 kegiatan	93.436.200,00
		Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	9.750.000,00	14 Desa	13.775.000,00	14 Desa	10.600.000,00	14 Desa	11.660.000,00	14 Desa	12.826.000,00	14 Desa	14.108.600,00
		Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan perijinan	1 Tahun	1 Tahun	42.000.000,00	14 Desa	61.000.000,00	14 Desa	59.600.000,00	14 Desa	65.560.000,00	14 Desa	72.116.000,00	14 Desa	79.327.600,00
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan	91.330.000,00	4 kegiatan	89.225.000,00	4 kegiatan	81.700.000,00	4 kegiatan	89.870.000,00	4 kegiatan	98.857.000,00	4 kegiatan	108.742.700,00
		Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terbinanya Kepala Desa/Perbekel/Lurah	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	80.975.000,00	14 desa/ kelurahan	19.925.000,00	14 desa/ kelurahan	14.650.000,00	14 desa/ kelurahan	16.115.000,00	14 desa/ kelurahan	17.726.500,00	14 desa/ kelurahan	19.499.150,00
		Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/Perbekel	Terlantiknya Perbekel Terpilih	1 desa	1 desa	2.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembinaan keagrariaan	Terlaksananya Pembinaan keagrariaan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	3.450.000,00	14 desa/ kelurahan	3.450.000,00	14 desa/ kelurahan	-						
		Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa / kelurahan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	4.700.000,00	14 desa/ kelurahan	65.850.000,00	14 desa/ kelurahan	-						
		Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	67.050.000,00	14 desa/ kelurahan	73.755.000,00	14 desa/ kelurahan	81.130.500,00	14 desa/ kelurahan	89.243.550,00
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan	166.660.000,00	4 kegiatan	169.000.000,00	4 kegiatan	241.716.000,00	4 kegiatan	265.887.600,00	4 kegiatan	292.476.360,00	4 kegiatan	321.723.996,00
		Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Tersedianya data potensi desa/kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan	72.300.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	73.150.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	169.175.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	186.092.500,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	204.701.750,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	225.171.925,00
		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan Dan Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	47.210.000,00	14 Desa/ Kelurahan	43.800.000,00	14 Desa/ Kelurahan	32.521.000,00	14 Desa/ Kelurahan	35.773.100,00	14 Desa/ Kelurahan	39.350.410,00	14 Desa/ Kelurahan	43.285.451,00
		Pendataan Dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat Dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen	3.700.000,00	30 Dokumen	3.650.000,00	30 Dokumen	-						
		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Dan Kecamatan	Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	60 Buku	60 Buku	36.300.000,00	60 Buku	41.250.000,00	60 Buku	-						
		Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tersedianya Dokumen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	60 Buku	60 Buku	7.150.000,00	60 Buku	7.150.000,00	60 Buku	-						

		Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Tersedianya Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	-	14 Desa/ Kelurahan	-	14 Desa/ Kelurahan	40.020.000,00	14 Desa/ Kelurahan	44.022.000,00	14 Desa/ Kelurahan	48.424.200,00	14 Desa/ Kelurahan	53.266.620,00
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		3 kegiatan	3 kegiatan	653.888.500,00	3 Kegiatan	698.578.800,00	2 Kegiatan	438.439.300,00	2 Kegiatan	482.283.230,00	2 Kegiatan	530.511.553,00	2 Kegiatan	583.562.708,30
		Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat Dan Budaya	Terjaganya dan terpeliharanya Pelestarian Adat dan Budaya	10 kelompok	10 kelompok	466.888.500,00	10 kelompok	490.903.800,00	10 kelompok	417.839.300,00	10 kelompok	459.623.230,00	10 kelompok	505.585.553,00	10 kelompok	556.144.108,30
		Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Terbinanya para pemuda dan lembaga sosial kemasyarakatan	10 kelompok	10 kelompok	30.000.000,00	10 kelompok	48.295.000,00	10 kelompok	20.600.000,00	10 kelompok	22.660.000,00	10 kelompok	24.926.000,00	10 kelompok	27.418.600,00
		Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan perayaan Hari-Hari Nasional	2 kali	2 kali	157.000.000,00	2 kali	159.380.000,00	2 kali	-						
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		4 kegiatan	4 kegiatan	189.370.000,00	4 kegiatan	167.339.900,00	3 Kegiatan	155.620.000,00	4 kegiatan	171.182.000,00	4 kegiatan	188.300.200,00	4 kegiatan	207.130.220,00
		Pengamanan Dan Pengawasan Peraturan Daerah	Tercapainya pengamanan dan pengawasan Perda	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	15.930.100,00	14 Desa/ Kelurahan	11.950.000,00	14 Desa/ Kelurahan	6.820.000,00	14 Desa/ Kelurahan	7.502.000,00	14 Desa/ Kelurahan	8.252.200,00	14 Desa/ Kelurahan	9.077.420,00
		Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	9.475.000,00	14 Desa/ Kelurahan	9.475.000,00	14 Desa/ Kelurahan	8.400.000,00	14 Desa/ Kelurahan	9.240.000,00	14 Desa/ Kelurahan	10.164.000,00	14 Desa/ Kelurahan	11.180.400,00
		Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	2.487.200,00	14 Desa/ Kelurahan	2.487.200,00	14 Desa/ Kelurahan	-						
		Pemantauan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah	Terpantaunya Ketentraman dan ketertiban wilayah	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	161.477.700,00	14 Desa/ Kelurahan	143.427.700,00	14 Desa/ Kelurahan	140.400.000,00	14 Desa/ Kelurahan	154.440.000,00	14 Desa/ Kelurahan	169.884.000,00	14 Desa/ Kelurahan	186.872.400,00
6	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 kegiatan	13 kegiatan	601.804.100,00	14 Kegiatan	628.260.000,00	14 Kegiatan	691.455.205,00	14 Kegiatan	760.600.725,50	14 Kegiatan	836.660.798,05	14 Kegiatan	920.326.877,86
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2903 Surat	2750 Surat	18.800.000,00	2750 Surat	20.350.000,00	2750 Surat	19.950.000,00	2750 Surat	21.945.000,00	2750 Surat	24.139.500,00	2750 Surat	26.553.450,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	28.792.800,00	36 Rekening	30.386.900,00	36 Rekening	55.000.000,00	36 Rekening	60.500.000,00	36 Rekening	66.550.000,00	36 Rekening	73.205.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Mobilitas Darat	1 Unit	1 Unit	66.360.000,00	12 Bulan	61.560.000,00	12 Bulan	69.320.000,00	12 Bulan	76.252.000,00	12 Bulan	83.877.200,00	12 Bulan	92.264.920,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terealisasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	15 Unit	2.500.000,00	15 Unit	2.200.000,00	15 Unit	1.950.000,00	15 Unit	2.145.000,00	15 Unit	2.359.500,00	15 Unit	2.595.450,00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terealisasinya jasa administrasi keuangan	135 OB	180 OB	254.210.000,00	180 OB	309.702.036,00	180 OB	351.798.000,00	180 OB	386.977.800,00	180 OB	425.675.580,00	180 OB	468.243.138,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terealisasinya jasa kebersihan	54 OB	72 OB	42.925.600,00	72 OB	36.476.328,00	72 OB	36.340.328,00	72 OB	39.974.360,80	72 OB	43.971.796,88	72 OB	48.368.976,57
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terealisasinya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 Unit	4 Unit	2.550.000,00	4 Unit	6.800.000,00	4 Unit	5.300.000,00	4 Unit	5.830.000,00	4 Unit	6.413.000,00	4 Unit	7.054.300,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	29 Jenis	30 Jenis	30.883.500,00	30 Jenis	36.020.200,00	30 Jenis	24.817.500,00	30 Jenis	27.299.250,00	30 Jenis	30.029.175,00	30 Jenis	33.032.092,50
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	9 Jenis	14.121.000,00	9 Jenis	15.581.000,00	9 Jenis	20.205.200,00	9 Jenis	22.225.720,00	9 Jenis	24.448.292,00	9 Jenis	26.893.121,20

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	1.846.000,00	9 Jenis	2.126.800,00	9 Jenis	1.312.600,00	9 Jenis	1.443.860,00	9 Jenis	1.588.246,00	9 Jenis	1.747.070,60
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	13 Unit	94.285.200,00	13 Unit	29.000.000,00	13 Unit	36.490.000,00	13 Unit	40.139.000,00	13 Unit	44.152.900,00	13 Unit	48.568.190,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	9.240.000,00	1 Tahun	10.164.000,00	1 Tahun	11.180.400,00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	17100 Orang	22800 Orang	8.760.000,00	22800 Orang	15.300.000,00	15000 Orang	9.600.000,00	15000 Orang	10.560.000,00	15000 Orang	11.616.000,00	15000 Orang	12.777.600,00
	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	9 Bulan	12 Bulan	27.370.000,00	12 Bulan	54.356.736,00	12 Bulan	50.971.577,00	12 Bulan	56.068.734,70	12 Bulan	61.675.608,17	12 Bulan	67.843.168,99
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4 kegiatan	4 kegiatan	133.300.000,00	4 kegiatan	161.800.000,00	4 kegiatan	480.499.495,00	4 kegiatan	528.549.444,50	4 kegiatan	581.404.388,95	4 kegiatan	639.544.827,85
	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	25.000.000,00	5 Unit	58.049.495,00	5 Unit	63.854.444,50	5 Unit	70.239.888,95	5 Unit	77.263.877,85
	Penyelenggaraan Dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terselenggaranya dan tersedianya sarana dan prasarana upacara	394 Kali	394 Kali	76.500.000,00	394 Kali	75.500.000,00	394 Kali	81.650.000,00	394 Kali	89.815.000,00	394 Kali	98.796.500,00	394 Kali	108.676.150,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4.000.000,00	4 Unit	105.000.000,00	4 Unit	115.500.000,00	4 Unit	127.050.000,00	4 Unit	139.755.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 Unit	9 Unit	56.800.000,00	1 Tahun	57.300.000,00	1 Tahun	57.500.000,00	1 Tahun	63.250.000,00	1 Tahun	69.575.000,00	1 Tahun	76.532.500,00
	Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasional	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	-	2 Kali	178.300.000,00	2 Kali	196.130.000,00	2 Kali	215.743.000,00	2 Kali	237.317.300,00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 kegiatan	1 kegiatan	1.850.000,00	1 kegiatan	1.900.000,00	1 kegiatan	-						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	9 Laporan	12 Laporan	1.850.000,00	12 Laporan	1.900.000,00	12 Laporan	-						
	Perencanaan Anggaran SKPD		1 kegiatan	1 kegiatan	74.160.000,00	1 kegiatan	96.820.000,00	1 kegiatan	93.200.000,00	1 kegiatan	102.520.000,00	1 kegiatan	112.772.000,00	1 kegiatan	124.049.200,00
	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya anggaran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	74.160.000,00	1 Tahun	96.820.000,00	1 Tahun	93.200.000,00	1 Tahun	102.520.000,00	1 Tahun	112.772.000,00	1 Tahun	124.049.200,00
	Informasi Pembangunan Daerah		1 kegiatan	1 kegiatan	48.813.900,00	1 kegiatan	52.813.900,00	1 kegiatan	26.820.000,00	1 kegiatan	29.502.000,00	1 kegiatan	32.452.200,00	1 kegiatan	35.697.420,00
	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terselenggaranya pameran/pawai pembangunan	1 Kali	1 Kali	48.813.900,00	1 Kali	52.813.900,00	1 Kali	26.820.000,00	1 Kali	29.502.000,00	1 Kali	32.452.200,00	1 Kali	35.697.420,00
					2.012.926.500,00		2.140.512.600,00		2.279.650.000,00		2.507.615.000,00		2.758.376.500,00		3.034.214.150,00

Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke										Unit Penanggung Jawab
Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)		Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
2 kegiatan	74.750.000	2 kegiatan	70.160.000							2 kegiatan	25.000,00	2 kegiatan	40.000,00							
14 Desa	13.750.000	14 Desa	10.560.000							14 Desa	25.000,00	14 Desa	40.000,00							Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
14 Desa	61.000.000	14 Desa	59.600.000							14 Desa	-	14 Desa	-							Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4 kegiatan	86.105.500	4 kegiatan	81.300.000							4 kegiatan	3.119.500,00	4 kegiatan	400.000,00							
14 desa/ kelurahan	16.805.500	14 desa/ kelurahan	14.650.000							14 desa/ kelurahan	3.119.500,00	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
-	-	-	-							-	-	-	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	3.450.000	14 desa/ kelurahan	-							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	65.850.000	14 desa/ kelurahan	-							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	66.650.000							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	400.000,00							Kasi Pemerintahan
4 kegiatan	160.755.000	4 kegiatan	241.688.000							4 kegiatan	8.245.000,00	4 kegiatan	28.000,00							
2 Desa dan 2 Kelurahan	73.150.000	2 Desa dan 2 Kelurahan	169.150.000							2 Desa dan 2 Kelurahan	-	2 Desa dan 2 Kelurahan	25.000,00							Kasi Pembangunan
14 Desa/ Kelurahan	37.405.000	14 Desa/ Kelurahan	32.518.000							14 Desa/ Kelurahan	6.395.000,00	14 Desa/ Kelurahan	3.000,00							Kasi Pembangunan
30 Dokumen	3.325.000	30 Dokumen	-							30 Dokumen	325.000,00	30 Dokumen	-							Kasi Pembangunan
60 Buku	39.750.000	60 Buku	-							60 Buku	1.500.000,00	60 Buku	-							Kasi Pembangunan
60 Buku	7.125.000	60 Buku	-							60 Buku	25.000,00	60 Buku	-							Kasi Pembangunan

9 Jenis	2.126.800	9 Jenis	1.312.600						9 Jenis	-	9 Jenis	-								Sekcam
13 Unit	28.990.000	13 Unit	35.702.052						13 Unit	10.000,00	13 Unit	787.948,00								Kasubag Perencanaan
1 Tahun	8.400.000	1 Tahun	8.400.000						1 Tahun	-	1 Tahun	-								Sekcam
22800 Orang	15.300.000	15000 Orang	9.600.000						22800 Orang	-	15000 Orang	-								Sekcam
12 Bulan	52.458.400	12 Bulan	50.971.100						12 Bulan	1.898.336,00	12 Bulan	477,00								Sekcam
4 kegiatan	134.724.453	4 kegiatan	476.253.946						4 kegiatan	2.075.547,00	4 kegiatan	2.991.054,00								
5 Unit	-	5 Unit	56.795.000						5 Unit	-	5 Unit	-								Kasubag Perencanaan
394 Kali	74.470.000	394 Kali	81.620.000						394 Kali	1.030.000,00	394 Kali	30.000,00								Sekcam
4 Unit	3.809.000	4 Unit	104.261.800						4 Unit	191.000,00	4 Unit	738.200,00								Kasubag Perencanaan
1 Tahun	56.445.453	1 Tahun	55.527.146						1 Tahun	854.547,00	1 Tahun	1.972.854,00								Kasubag Perencanaan
2 Kali	-	2 Kali	178.050.000						2 Kali	-	2 Kali	250.000,00								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	1.820.000	1 kegiatan	-						1 kegiatan	80.000,00	1 kegiatan	-								
12 Laporan	1.820.000	12 Laporan	-						12 Laporan	80.000,00	12 Laporan	-								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	96.110.000	1 kegiatan	93.125.000						1 kegiatan	710.000,00	1 kegiatan	75.000,00								
1 Tahun	96.110.000	1 Tahun	93.125.000						1 Tahun	710.000,00	1 Tahun	75.000,00								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	52.813.900	1 kegiatan	26.820.000						1 kegiatan	-	1 kegiatan	-								
1 Kali	52.813.900	1 Kali	26.820.000						1 Kali	-	1 Kali	-								Sekcam
	2.046.704.511,00		2.265.689.602,00							68.808.089,00		12.705.903,00								

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Seksi Penanggung jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan	14 Kegiatan	609.073.900,00	14 Kegiatan	691.455.205,00	14 Kegiatan	760.600.725,50	14 Kegiatan	836.660.798,05	14 Kegiatan	920.326.877,86	14 Kegiatan	3.818.117.506,41	Sekretariat
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	4 kegiatan	4 kegiatan	93.520.000,00	5 kegiatan	480.499.495,00	5 kegiatan	528.549.444,50	5 kegiatan	581.404.388,95	5 kegiatan	639.544.827,85	5 kegiatan	2.323.518.156,30	Sekretariat
3. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.900.000,00	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	Sekretariat						
4. Program Perencanaan anggaran SKPD	Tersedianya perencanaan anggaran SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	14.500.000,00	1 kegiatan	93.200.000,00	1 kegiatan	102.520.000,00	1 kegiatan	112.772.000,00	1 kegiatan	124.049.200,00	1 kegiatan	447.041.200,00	Sekretariat
5. Program Informasi tentang Pembangunan Daerah	Tersedianya Informasi tentang Pembangunan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	52.813.900,00	1 kegiatan	26.820.000,00	1 kegiatan	29.502.000,00	1 kegiatan	32.452.200,00	1 kegiatan	35.697.420,00	1 kegiatan	177.285.520,00	Sekretariat
6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	3 kegiatan	3 kegiatan	183.800.000,00	2 Kegiatan	438.439.300,00	2 Kegiatan	482.283.230,00	2 Kegiatan	530.511.553,00	2 Kegiatan	583.562.708,30	2 Kegiatan	2.218.596.791,30	Seksi Sosial dan Budaya
7. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	33.685.000,00	2 kegiatan	70.200.000,00	2 kegiatan	77.220.000,00	2 kegiatan	84.942.000,00	2 kegiatan	93.436.200,00	2 kegiatan	359.483.200,00	Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	84.872.000,00	2 Kegiatan	81.700.000,00	2 Kegiatan	89.870.000,00	2 Kegiatan	98.857.000,00	2 Kegiatan	108.742.700,00	2 Kegiatan	464.041.700,00	Seksi Pemerintahan
9. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	155.445.000,00	3 Kegiatan	241.716.000,00	3 Kegiatan	265.887.600,00	3 Kegiatan	292.476.360,00	3 Kegiatan	321.723.996,00	3 Kegiatan	1.277.248.956,00	Seksi Pembangunan
10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 kegiatan	4 kegiatan	110.555.000,00	3 Kegiatan	155.620.000,00	3 Kegiatan	171.182.000,00	3 Kegiatan	188.300.200,00	3 Kegiatan	207.130.220,00	3 Kegiatan	832.787.420,00	Seksi Ketentraman, Keterlibatan dan Sat Pol PP

Renstra SKPD Kantor Camat Sawan, Kabupaten Buleleng
Periode Pelaksanaan : 2017 s.d 2022

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten Buleleng yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2017)		Target Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun ke									
							Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		2 kegiatan	2 kegiatan	51.750.000,00	2 kegiatan	74.775.000,00	2 kegiatan	70.200.000,00	2 kegiatan	77.220.000,00	2 kegiatan	84.942.000,00	2 kegiatan	93.436.200,00
		Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	9.750.000,00	14 Desa	13.775.000,00	14 Desa	10.600.000,00	14 Desa	11.660.000,00	14 Desa	12.826.000,00	14 Desa	14.108.600,00
		Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan perijinan	1 Tahun	1 Tahun	42.000.000,00	14 Desa	61.000.000,00	14 Desa	59.600.000,00	14 Desa	65.560.000,00	14 Desa	72.116.000,00	14 Desa	79.327.600,00
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan	91.330.000,00	4 kegiatan	89.225.000,00	4 kegiatan	81.700.000,00	4 kegiatan	89.870.000,00	4 kegiatan	98.857.000,00	4 kegiatan	108.742.700,00
		Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Terbinanya Kepala Desa/Perbekel/Lurah	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	80.975.000,00	14 desa/ kelurahan	19.925.000,00	14 desa/ kelurahan	14.650.000,00	14 desa/ kelurahan	16.115.000,00	14 desa/ kelurahan	17.726.500,00	14 desa/ kelurahan	19.499.150,00
		Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/Perbekel	Terlantiknya Perbekel Terpilih	1 desa	1 desa	2.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembinaan keagrariaan	Terlaksananya Pembinaan keagrariaan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	3.450.000,00	14 desa/ kelurahan	3.450.000,00	14 desa/ kelurahan	-						
		Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa / kelurahan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	4.700.000,00	14 desa/ kelurahan	65.850.000,00	14 desa/ kelurahan	-						
		Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	67.050.000,00	14 desa/ kelurahan	73.755.000,00	14 desa/ kelurahan	81.130.500,00	14 desa/ kelurahan	89.243.550,00
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan	166.660.000,00	4 kegiatan	169.000.000,00	4 kegiatan	241.716.000,00	4 kegiatan	265.887.600,00	4 kegiatan	292.476.360,00	4 kegiatan	321.723.996,00
		Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Tersedianya data potensi desa/kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan	72.300.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	73.150.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	169.175.000,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	186.092.500,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	204.701.750,00	2 Desa dan 2 Kelurahan	225.171.925,00
		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan Dan Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	47.210.000,00	14 Desa/ Kelurahan	43.800.000,00	14 Desa/ Kelurahan	32.521.000,00	14 Desa/ Kelurahan	35.773.100,00	14 Desa/ Kelurahan	39.350.410,00	14 Desa/ Kelurahan	43.285.451,00
		Pendataan Dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat Dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen	3.700.000,00	30 Dokumen	3.650.000,00	30 Dokumen	-						
		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Dan Kecamatan	Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	60 Buku	60 Buku	36.300.000,00	60 Buku	41.250.000,00	60 Buku	-						
		Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tersedianya Dokumen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	60 Buku	60 Buku	7.150.000,00	60 Buku	7.150.000,00	60 Buku	-						

		Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Tersedianya Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	-	14 Desa/ Kelurahan	-	14 Desa/ Kelurahan	40.020.000,00	14 Desa/ Kelurahan	44.022.000,00	14 Desa/ Kelurahan	48.424.200,00	14 Desa/ Kelurahan	53.266.620,00
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		3 kegiatan	3 kegiatan	653.888.500,00	3 Kegiatan	698.578.800,00	2 Kegiatan	438.439.300,00	2 Kegiatan	482.283.230,00	2 Kegiatan	530.511.553,00	2 Kegiatan	583.562.708,30
		Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat Dan Budaya	Terjaganya dan terpeliharanya Pelestarian Adat dan Budaya	10 kelompok	10 kelompok	466.888.500,00	10 kelompok	490.903.800,00	10 kelompok	417.839.300,00	10 kelompok	459.623.230,00	10 kelompok	505.585.553,00	10 kelompok	556.144.108,30
		Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Terbinanya para pemuda dan lembaga sosial kemasyarakatan	10 kelompok	10 kelompok	30.000.000,00	10 kelompok	48.295.000,00	10 kelompok	20.600.000,00	10 kelompok	22.660.000,00	10 kelompok	24.926.000,00	10 kelompok	27.418.600,00
		Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan perayaan Hari-Hari Nasional	2 kali	2 kali	157.000.000,00	2 kali	159.380.000,00	2 kali	-						
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		4 kegiatan	4 kegiatan	189.370.000,00	4 kegiatan	167.339.900,00	3 Kegiatan	155.620.000,00	4 kegiatan	171.182.000,00	4 kegiatan	188.300.200,00	4 kegiatan	207.130.220,00
		Pengamanan Dan Pengawasan Peraturan Daerah	Tercapainya pengamanan dan pengawasan Perda	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	15.930.100,00	14 Desa/ Kelurahan	11.950.000,00	14 Desa/ Kelurahan	6.820.000,00	14 Desa/ Kelurahan	7.502.000,00	14 Desa/ Kelurahan	8.252.200,00	14 Desa/ Kelurahan	9.077.420,00
		Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	9.475.000,00	14 Desa/ Kelurahan	9.475.000,00	14 Desa/ Kelurahan	8.400.000,00	14 Desa/ Kelurahan	9.240.000,00	14 Desa/ Kelurahan	10.164.000,00	14 Desa/ Kelurahan	11.180.400,00
		Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	2.487.200,00	14 Desa/ Kelurahan	2.487.200,00	14 Desa/ Kelurahan	-						
		Pemantauan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah	Terpantaunya Ketentraman dan ketertiban wilayah	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	161.477.700,00	14 Desa/ Kelurahan	143.427.700,00	14 Desa/ Kelurahan	140.400.000,00	14 Desa/ Kelurahan	154.440.000,00	14 Desa/ Kelurahan	169.884.000,00	14 Desa/ Kelurahan	186.872.400,00
6	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 kegiatan	13 kegiatan	601.804.100,00	14 Kegiatan	628.260.000,00	14 Kegiatan	691.455.205,00	14 Kegiatan	760.600.725,50	14 Kegiatan	836.660.798,05	14 Kegiatan	920.326.877,86
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2903 Surat	2750 Surat	18.800.000,00	2750 Surat	20.350.000,00	2750 Surat	19.950.000,00	2750 Surat	21.945.000,00	2750 Surat	24.139.500,00	2750 Surat	26.553.450,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	28.792.800,00	36 Rekening	30.386.900,00	36 Rekening	55.000.000,00	36 Rekening	60.500.000,00	36 Rekening	66.550.000,00	36 Rekening	73.205.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Mobilitas Darat	1 Unit	1 Unit	66.360.000,00	12 Bulan	61.560.000,00	12 Bulan	69.320.000,00	12 Bulan	76.252.000,00	12 Bulan	83.877.200,00	12 Bulan	92.264.920,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terealisasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	15 Unit	2.500.000,00	15 Unit	2.200.000,00	15 Unit	1.950.000,00	15 Unit	2.145.000,00	15 Unit	2.359.500,00	15 Unit	2.595.450,00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terealisasinya jasa administrasi keuangan	135 OB	180 OB	254.210.000,00	180 OB	309.702.036,00	180 OB	351.798.000,00	180 OB	386.977.800,00	180 OB	425.675.580,00	180 OB	468.243.138,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terealisasinya jasa kebersihan	54 OB	72 OB	42.925.600,00	72 OB	36.476.328,00	72 OB	36.340.328,00	72 OB	39.974.360,80	72 OB	43.971.796,88	72 OB	48.368.976,57
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terealisasinya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 Unit	4 Unit	2.550.000,00	4 Unit	6.800.000,00	4 Unit	5.300.000,00	4 Unit	5.830.000,00	4 Unit	6.413.000,00	4 Unit	7.054.300,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	29 Jenis	30 Jenis	30.883.500,00	30 Jenis	36.020.200,00	30 Jenis	24.817.500,00	30 Jenis	27.299.250,00	30 Jenis	30.029.175,00	30 Jenis	33.032.092,50
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	9 Jenis	14.121.000,00	9 Jenis	15.581.000,00	9 Jenis	20.205.200,00	9 Jenis	22.225.720,00	9 Jenis	24.448.292,00	9 Jenis	26.893.121,20

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	1.846.000,00	9 Jenis	2.126.800,00	9 Jenis	1.312.600,00	9 Jenis	1.443.860,00	9 Jenis	1.588.246,00	9 Jenis	1.747.070,60
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	13 Unit	94.285.200,00	13 Unit	29.000.000,00	13 Unit	36.490.000,00	13 Unit	40.139.000,00	13 Unit	44.152.900,00	13 Unit	48.568.190,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	8.400.000,00	1 Tahun	9.240.000,00	1 Tahun	10.164.000,00	1 Tahun	11.180.400,00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	17100 Orang	22800 Orang	8.760.000,00	22800 Orang	15.300.000,00	15000 Orang	9.600.000,00	15000 Orang	10.560.000,00	15000 Orang	11.616.000,00	15000 Orang	12.777.600,00
	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	9 Bulan	12 Bulan	27.370.000,00	12 Bulan	54.356.736,00	12 Bulan	50.971.577,00	12 Bulan	56.068.734,70	12 Bulan	61.675.608,17	12 Bulan	67.843.168,99
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4 kegiatan	4 kegiatan	133.300.000,00	4 kegiatan	161.800.000,00	4 kegiatan	480.499.495,00	4 kegiatan	528.549.444,50	4 kegiatan	581.404.388,95	4 kegiatan	639.544.827,85
	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	25.000.000,00	5 Unit	58.049.495,00	5 Unit	63.854.444,50	5 Unit	70.239.888,95	5 Unit	77.263.877,85
	Penyelenggaraan Dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Terselenggaranya dan tersedianya sarana dan prasarana upacara	394 Kali	394 Kali	76.500.000,00	394 Kali	75.500.000,00	394 Kali	81.650.000,00	394 Kali	89.815.000,00	394 Kali	98.796.500,00	394 Kali	108.676.150,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4.000.000,00	4 Unit	105.000.000,00	4 Unit	115.500.000,00	4 Unit	127.050.000,00	4 Unit	139.755.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 Unit	9 Unit	56.800.000,00	1 Tahun	57.300.000,00	1 Tahun	57.500.000,00	1 Tahun	63.250.000,00	1 Tahun	69.575.000,00	1 Tahun	76.532.500,00
	Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasional	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	-	2 Kali	178.300.000,00	2 Kali	196.130.000,00	2 Kali	215.743.000,00	2 Kali	237.317.300,00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 kegiatan	1 kegiatan	1.850.000,00	1 kegiatan	1.900.000,00	1 kegiatan	-						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	9 Laporan	12 Laporan	1.850.000,00	12 Laporan	1.900.000,00	12 Laporan	-						
	Perencanaan Anggaran SKPD		1 kegiatan	1 kegiatan	74.160.000,00	1 kegiatan	96.820.000,00	1 kegiatan	93.200.000,00	1 kegiatan	102.520.000,00	1 kegiatan	112.772.000,00	1 kegiatan	124.049.200,00
	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya anggaran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	74.160.000,00	1 Tahun	96.820.000,00	1 Tahun	93.200.000,00	1 Tahun	102.520.000,00	1 Tahun	112.772.000,00	1 Tahun	124.049.200,00
	Informasi Pembangunan Daerah		1 kegiatan	1 kegiatan	48.813.900,00	1 kegiatan	52.813.900,00	1 kegiatan	26.820.000,00	1 kegiatan	29.502.000,00	1 kegiatan	32.452.200,00	1 kegiatan	35.697.420,00
	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terselenggaranya pameran/pawai pembangunan	1 Kali	1 Kali	48.813.900,00	1 Kali	52.813.900,00	1 Kali	26.820.000,00	1 Kali	29.502.000,00	1 Kali	32.452.200,00	1 Kali	35.697.420,00
					2.012.926.500,00		2.140.512.600,00		2.279.650.000,00		2.507.615.000,00		2.758.376.500,00		3.034.214.150,00

Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke										Unit Penanggung Jawab
Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)		Tahun ke- I (2018)		Tahun ke- II (2019)		Tahun ke- III (2020)		Tahun ke- IV (2021)		Tahun ke- V (2022)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
2 kegiatan	74.750.000	2 kegiatan	70.160.000							2 kegiatan	25.000,00	2 kegiatan	40.000,00							
14 Desa	13.750.000	14 Desa	10.560.000							14 Desa	25.000,00	14 Desa	40.000,00							Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
14 Desa	61.000.000	14 Desa	59.600.000							14 Desa	-	14 Desa	-							Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4 kegiatan	86.105.500	4 kegiatan	81.300.000							4 kegiatan	3.119.500,00	4 kegiatan	400.000,00							
14 desa/ kelurahan	16.805.500	14 desa/ kelurahan	14.650.000							14 desa/ kelurahan	3.119.500,00	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
-	-	-	-							-	-	-	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	3.450.000	14 desa/ kelurahan	-							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	65.850.000	14 desa/ kelurahan	-							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	-							Kasi Pemerintahan
14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	66.650.000							14 desa/ kelurahan	-	14 desa/ kelurahan	400.000,00							Kasi Pemerintahan
4 kegiatan	160.755.000	4 kegiatan	241.688.000							4 kegiatan	8.245.000,00	4 kegiatan	28.000,00							
2 Desa dan 2 Kelurahan	73.150.000	2 Desa dan 2 Kelurahan	169.150.000							2 Desa dan 2 Kelurahan	-	2 Desa dan 2 Kelurahan	25.000,00							Kasi Pembangunan
14 Desa/ Kelurahan	37.405.000	14 Desa/ Kelurahan	32.518.000							14 Desa/ Kelurahan	6.395.000,00	14 Desa/ Kelurahan	3.000,00							Kasi Pembangunan
30 Dokumen	3.325.000	30 Dokumen	-							30 Dokumen	325.000,00	30 Dokumen	-							Kasi Pembangunan
60 Buku	39.750.000	60 Buku	-							60 Buku	1.500.000,00	60 Buku	-							Kasi Pembangunan
60 Buku	7.125.000	60 Buku	-							60 Buku	25.000,00	60 Buku	-							Kasi Pembangunan

9 Jenis	2.126.800	9 Jenis	1.312.600						9 Jenis	-	9 Jenis	-								Sekcam
13 Unit	28.990.000	13 Unit	35.702.052						13 Unit	10.000,00	13 Unit	787.948,00								Kasubag Perencanaan
1 Tahun	8.400.000	1 Tahun	8.400.000						1 Tahun	-	1 Tahun	-								Sekcam
22800 Orang	15.300.000	15000 Orang	9.600.000						22800 Orang	-	15000 Orang	-								Sekcam
12 Bulan	52.458.400	12 Bulan	50.971.100						12 Bulan	1.898.336,00	12 Bulan	477,00								Sekcam
4 kegiatan	134.724.453	4 kegiatan	476.253.946						4 kegiatan	2.075.547,00	4 kegiatan	2.991.054,00								
5 Unit	-	5 Unit	56.795.000						5 Unit	-	5 Unit	-								Kasubag Perencanaan
394 Kali	74.470.000	394 Kali	81.620.000						394 Kali	1.030.000,00	394 Kali	30.000,00								Sekcam
4 Unit	3.809.000	4 Unit	104.261.800						4 Unit	191.000,00	4 Unit	738.200,00								Kasubag Perencanaan
1 Tahun	56.445.453	1 Tahun	55.527.146						1 Tahun	854.547,00	1 Tahun	1.972.854,00								Kasubag Perencanaan
2 Kali	-	2 Kali	178.050.000						2 Kali	-	2 Kali	250.000,00								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	1.820.000	1 kegiatan	-						1 kegiatan	80.000,00	1 kegiatan	-								
12 Laporan	1.820.000	12 Laporan	-						12 Laporan	80.000,00	12 Laporan	-								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	96.110.000	1 kegiatan	93.125.000						1 kegiatan	710.000,00	1 kegiatan	75.000,00								
1 Tahun	96.110.000	1 Tahun	93.125.000						1 Tahun	710.000,00	1 Tahun	75.000,00								Kasubag Perencanaan
1 kegiatan	52.813.900	1 kegiatan	26.820.000						1 kegiatan	-	1 kegiatan	-								
1 Kali	52.813.900	1 Kali	26.820.000						1 Kali	-	1 Kali	-								Sekcam
	2.046.704.511,00		2.265.689.602,00							68.808.089,00		12.705.903,00								

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Seksi Penanggung jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan	14 Kegiatan	609.073.900,00	14 Kegiatan	691.455.205,00	14 Kegiatan	760.600.725,50	14 Kegiatan	836.660.798,05	14 Kegiatan	920.326.877,86	14 Kegiatan	3.818.117.506,41	Sekretariat
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	4 kegiatan	4 kegiatan	93.520.000,00	5 kegiatan	480.499.495,00	5 kegiatan	528.549.444,50	5 kegiatan	581.404.388,95	5 kegiatan	639.544.827,85	5 kegiatan	2.323.518.156,30	Sekretariat
3. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.900.000,00	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	Sekretariat						
4. Program Perencanaan anggaran SKPD	Tersedianya perencanaan anggaran SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	14.500.000,00	1 kegiatan	93.200.000,00	1 kegiatan	102.520.000,00	1 kegiatan	112.772.000,00	1 kegiatan	124.049.200,00	1 kegiatan	447.041.200,00	Sekretariat
5. Program Informasi tentang Pembangunan Daerah	Tersedianya Informasi tentang Pembangunan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	52.813.900,00	1 kegiatan	26.820.000,00	1 kegiatan	29.502.000,00	1 kegiatan	32.452.200,00	1 kegiatan	35.697.420,00	1 kegiatan	177.285.520,00	Sekretariat
6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	3 kegiatan	3 kegiatan	183.800.000,00	2 Kegiatan	438.439.300,00	2 Kegiatan	482.283.230,00	2 Kegiatan	530.511.553,00	2 Kegiatan	583.562.708,30	2 Kegiatan	2.218.596.791,30	Seksi Sosial dan Budaya
7. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	33.685.000,00	2 kegiatan	70.200.000,00	2 kegiatan	77.220.000,00	2 kegiatan	84.942.000,00	2 kegiatan	93.436.200,00	2 kegiatan	359.483.200,00	Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	84.872.000,00	2 Kegiatan	81.700.000,00	2 Kegiatan	89.870.000,00	2 Kegiatan	98.857.000,00	2 Kegiatan	108.742.700,00	2 Kegiatan	464.041.700,00	Seksi Pemerintahan
9. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	155.445.000,00	3 Kegiatan	241.716.000,00	3 Kegiatan	265.887.600,00	3 Kegiatan	292.476.360,00	3 Kegiatan	321.723.996,00	3 Kegiatan	1.277.248.956,00	Seksi Pembangunan
10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	4 kegiatan	4 kegiatan	110.555.000,00	3 Kegiatan	155.620.000,00	3 Kegiatan	171.182.000,00	3 Kegiatan	188.300.200,00	3 Kegiatan	207.130.220,00	3 Kegiatan	832.787.420,00	Seksi Ketentraman, Keterlibatan dan Sat Pol PP